

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Atmadja, Arifin.P Soeria, 2013, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori,Praktik, dan Kritik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung.
- Direktorat Pembinaan BUMN, 1991, *Himpunan Peraturan BUMN*, Departemen Keuangan, Jakarta.
- D. Andhi Nirwanto. 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta.
- Fukuyama, Francis, 2010, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, diterj. Oleh Ruslani , Cet. Kedua Yogyakarta: Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Goedhart, C., 1973, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terj. Ratmoko, Jakarta.
- George Binney & Collin williams, 1997, *Leaning into the future: Changing the way People Change Organizations*, Nicholas dan Brealey, London.
- Gouillart, Francis & James N. Kelly, 1995, *Transforming the Organization*, McGraw, New York.
- Hadjon, Philipus M. Paulus Efendi Lotulung,dkk, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Havens, Harry S, 1990 “*The Evaluation of the General Accountiung Office: From Voucher Audits to Program Evaluations*, United States General Accounting Office.
- Khoza, Reuel J and Mohamed Adam, 2005, *The Power Of Governance: Enhancing the Performance of State-Owned Enterprises*, Palgravemacmillan, Newyork.

- Lotolung, Paulus Effendi, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- M. Tomasko, Robert, 1993, *Rethinking the Corporation: the Architecture of Change*, American Management Association (Amacom), New York.
- Peters, B. Guy 2000, *"The Politics of Bureaucracy"*, London Routledge, London.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, *Makna "Keuangan Negara dan "Kerugian Negara" Dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya Dengan BUMN/Persero: Laporan Penelitian*, Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013, *Interpretasi tentang Makna Uang Negara dan Kerugian Negara dalam Perkara Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero: Kajian tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011, Laporan Penelitian*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prasetya, Rudhi dan Neil Hamilton, 1976, *The Regulation of Indonesian State Enterprise, Law and Public Enterprise in Asia*, International Legal Center, Praeger Publishers, New York.
- Prasetya, Rudhi, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Undang-Undang Menurut UU No. 1 tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 2014, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman, Meuthia Ganie, 2000 *"Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya" dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik )*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Sadijjono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laks Bang PRESS indo.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) , Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance* , Mandar Maju, Bandung.

Simatupang, Dian Puji N, 2011, *Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

Suratman dan H.Phillips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soeria, Atmadja, Arifin P. 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, PT Gramedia.

Soekanto, Soerjono dan sri Mamudji, *Peneletian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi pertama, cetakan kelima. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 2001.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supromono, Gatot, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim BEPEKA, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta, Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media*, Bandung.

Whitfield, Dexter, 2001, *Public Service or Corporate Welfare: Rethinking The National State in The Global Economy*.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah, Insan Cendekia*, Surabaya.

#### **ARTIKEL, MAKALAH, INTERNET :**

Adji, Indriyanto Seno, 2016 “*Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan atau Kebebasan Diskresioner?* ”, makalah, disampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Khusus 2016, dengan Tema “*Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*”, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, Jakarta Selatan.

-----, 2016, Disampaikan pada Kedeputian Bidang Penindakan – Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada

Pendidikan & Pelatihan Terpadu Penanganan/Pelatihan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, pada Tanggal 07 September 2016 sampai dengan Tanggal 09 September 2016.

Adhari, Agus, *Eksistensi BUMN sebagai Korporasi Yang dikuasai Negara*, artikel diambil dari [majour.maranatha.edu/index.php/dialogia-iuridica/article/](http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogia-iuridica/article/), pada 22 Oktober 2016.

Brown, J. Robert, 2006-2007, "Disloyalty without limits : 'Independent' Directors and The Elimination of the Duty of Loyalty" *Kentucky Law Journal* Vol. 95.

Brown, Rajeswary Amplavanar, 2006, *Indonesian Corporations, Cronyism, and Corruption*, *Modern Asian Studies*, Vol. 40, No. 4.

Business Review, PSO (*Public Service Obligation*) Untung atau Buntung?, Edisi 07, Tahun 05, Oktober 2006.

J. danieal, Shirley, Joshua K. Cieslewicz and Hamid Purjalali, *The Impact of Arief, Sritua, Perjalanan Nasionalisme Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*, Prisma 2 Februari 1991.

Jensen and Murphy, 1990, *Performance Pay and Top-Management Incentives*, 98 *J. Pol. Econ.*

Laffont and Tirole, 1991, *Privatization and Incentives*, 7 *J. L. Econ. & Org.*; Sappington and Stiglitz, *Privatization, Information and Incentives*, 6 *J. Pol'y Analysis & Mgmt.*, 1987.

*National Economic Culture and Country-Level Institutional Environment on Corporate Governance Practices: Theory and Empirical Evidence*, *Mir: Management International Review*, Vol. 52, no.3 (2012).

Kompas, *Menkeu: DPR Bisa Saja Menolak Pencairan Dana PMN*, [www.bisniskeuangan.kompas.com](http://www.bisniskeuangan.kompas.com) diakses pada 30 Oktober 2015.

OECD, *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises*, 2015 Edition, diambil dari [www.OECD.org](http://www.OECD.org), pada 22 Oktober 2016.

Pramono, Nindyo, 2007, "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN", tulisan dalam *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru*, Gitama Jaya, Jakarta.

PWC, 2015, *State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?*, Artikel diakses dari, [www.psrc.pwc.com](http://www.psrc.pwc.com) pada 2 februari 2016.

Shapiro and Willig, 1990, *Economic Rationales For the Scope of Privatization, in The Political Economy of Public Sector Reform and Privatization*, Suleiman & Waterbury eds.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.